

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam pelaksanaannya, proyek-proyek infrastruktur seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama apabila tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap pelanggaran lingkungan yang terjadi dalam proyek infrastruktur di Kota Medan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara dengan pihak terkait (dinas lingkungan hidup, aparat penegak hukum, dan masyarakat terdampak), serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan di Kota Medan masih belum optimal. Beberapa kendala utama meliputi lemahnya pengawasan, minimnya koordinasi antarinstansi, kurangnya sanksi tegas, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku proyek. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) dengan implementasi di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi, peningkatan kapasitas lembaga lingkungan hidup, serta penegakan sanksi hukum secara tegas dan konsisten. Diperlukan juga partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal pelaksanaan proyek infrastruktur agar tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. **Kata kunci:** Penegakan Hukum, Pelanggaran Lingkungan, Proyek Infrastruktur, Kota Medan, AMDAL.

ABSTRACT

Infrastructure development plays a vital role in improving public welfare and driving economic growth. However, in practice, infrastructure projects often cause negative environmental impacts, particularly when legal regulations are not properly followed. This study aims to analyze how law enforcement is carried out in response to environmental violations in infrastructure projects in the city of Medan, as well as to identify the factors that hinder effective law enforcement. This research uses a socio-legal approach, with data collected through literature review, interviews with relevant stakeholders (such as the environmental agency, law enforcement authorities, and affected communities), and field observations. The results indicate that law enforcement against environmental violations in Medan remains suboptimal. Major obstacles include weak monitoring, lack of coordination among institutions, insufficient sanctions, and low legal awareness among project implementers.